

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai pemetaan keuangan daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur. Di mana pemetaan keuangan daerah diukur berdasarkan penerimaan PAD, BHP dan BHBP, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan pemetaan keuangan daerah terhadap 38 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur, rata-rata 90% kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jawa Timur memiliki PAD, BHP dan BHBP yang relatif rendah atau masih tergolong daerah bergantung. Sedangkan sisanya 10% tergolong daerah yang memiliki PAD, BHP dan BHBP yang relatif sedang atau daerah berkembang dan daerah yang memiliki PAD, BHP dan BHBP yang tinggi atau tergolong daerah mandiri, dimana hanya kota Surabaya yang memiliki karakteristik sebagai daerah mandiri.
2. Daerah yang tergolong dalam *cluster* daerah mandiri memiliki karakteristik sebagai daerah industri dan perdagangan. Daerah yang tergolong dalam *cluster* daerah berkembang, sebagian besar memiliki karakteristik sebagai daerah semi industri dan berada di sekitar ibu kota propinsi yaitu Kota Surabaya (daerah mandiri). Sedangkan daerah yang tergolong dalam *cluster* daerah bergantung sebagian besar memiliki karakteristik sebagai daerah agraris.

2. Tingginya proporsi daerah bergantung (tidak mandiri) yang ada pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa otonomi daerah belum mampu mengurangi ketergantungan pemerintahan daerah terhadap bantuan dari pemerintahan pusat, yang berarti otonomi daerah belum berjalan secara efektif sesuai dengan yang diharapkan.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Propinsi Jawa Timur disarankan dapat melakukan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerahnya masing-masing sehingga dapat memperbaiki kondisi daerahnya sehingga menjadi daerah yang ideal atau mandiri.
- b. Penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperluas variabel yang digunakan, tidak hanya menggunakan PAD, BHP dan BHBP sebagai variabel penelitiannya tetapi dapat menggunakan semua pos-pos yang ada pada keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan dan belanja atau pembiayaan. Begitu pula dengan wilayah yang akan menjadi obyek penelitian selanjutnya, tidak hanya kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jawa Timur tetapi dapat diperluas, misalnya menggunakan kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa atau bahkan semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H., 2007, Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah, *Simposium Nasional Akuntansi XI Padang*.
- Arif, B., Muchlis, dan Iskandar, 2002, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik, 2006, Analisis Hasil Listing Sensus Ekonomi 2006, BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik, 2007, Statistik Keuangan PemDa Kabupaten/Kota 2006-2007, BPS Jakarta-Indonesia.
- Darise Nurlan, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, Jakarta: Indeks.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Halim Abdul, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim Abdul, 2007, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. H. M., 2009, Mekanisme Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Tulungagung, *Journal of Business of Management 2009*, Volume 06 Nomor 01.
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI.
- Mursinto Djoko, 2005, Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Suatu Kajian Normatif), *Majalah Ekonomi*, 2 Agustus 2005.
- Kuncoro Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Erlangga
- Presiden Republik Indonesia, 1997, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
- Presiden Republik Indonesia, 1999, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Presiden Republik Indonesia, 1999, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Presiden Republik Indonesia, 2004, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Presiden Republik Indonesia, 2004, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Presiden Republik Indonesia, 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Presiden Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

- Presiden Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Santoso, Sugeng, 2002, *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Setiaji Wirawan dan Adi, P.H., 2007, Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali), *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar*.
- Susilo, G. T. dan Hariadi, P., 2007, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan sesudah Otonomi (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah), *Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama Pascasarjana UPNV*, Surabaya 26-27 April 2007 .
- Sutiyoso, 2007, Pemerintah Pusat Penentu Keberhasilan Otonomi Daerah, *Warta Gubernur, Jurnal Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Volume 1 Nomor 1: 11–18.
- Widjaja, HAW, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raya Grafindo Persada.